

JURNAL

INTERNATIONAL & DIPLOMACY

Universitas Satya Negara Indonesia



ISSN: 2460-8513

**UPAYA DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP KLAIM CHINA ATAS ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA DI LAUT NATUNA**

Fitra Deni dan Lukman Sahri

**KERJA SAMA ASEAN DEFENSE INDUSTRY COLLABORATION UNTUK MENENTUKAN
PLATFORM PERSENJATAAN**

Novri Surya Ningsih

PENGARUH APEC TERHADAP HUKUM EKONOMI INDONESIA

Efan Setiadi

LAND PROTESTS IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge

MUSIK K-POP SEBAGAI ALAT DIPLOMASI DALAM SOFT POWER KOREA SELATAN

Syafril Alam dan Ansgrasia Jenifer Nyarimun

**REFORMASI ALIANSI PERTAHANAN AMERIKA SERIKAT-JEPANG-KOREA SELATAN
MENGHADAPI ANCAMAN NUKLIR KOREA UTARA**

Sony Iriawan

**UPAYA ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE
DALAM MENANGANI KONFLIK DI UKRAINA TIMUR**

Muhammad Dedy Yanuar dan Ali Muhammad

**DAMPAK KUDETA PRESIDEN VIKTOR YANUKOVYCH DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI
UKRAINA DENGAN UNI EROPA**

Fahri Ananta Said dan Partogi J. Samosir

**PENGARUH KARAKTERISTIK SUMBER DAYA AIR DI PALESTINA-ISRAEL TERHADAP
PEMBERONTAKAN PENDUDUK PALESTINA**

Pradono Budi Saputro

DAFTAR ISI

Susunan Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Pengantar Redaksi	iii-iv
Upaya Diplomasi Indonesia terhadap Klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Fitra Deni dan Lukman Sahri	1-22
Kerja Sama <i>ASEAN Defense Industry Collaboration</i> untuk Menentukan Platform Persenjataan Novri Surya Ningsih	23-42
Pengaruh APEC terhadap Hukum Ekonomi Indonesia Efan Setiadi	43-58
<i>Land Protests in the People's Republic of China</i> Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge	59-74
Musik K-Pop sebagai Alat Diplomasi dalam <i>Soft Power</i> Korea Selatan Syafriil Alam dan Angrasia Jenifer Nyarimun	75-100
Reformasi Aliansi Pertahanan Amerika Serikat-Jepang-Korea Selatan Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara Sony Iriawan	101-120
Upaya <i>Organization for Security and Co-operation in Europe</i> dalam Menangani Konflik di Ukraina Timur Muhammad Dedy Yanuar dan Ali Muhammad	121-138
Dampak Kudeta Presiden Viktor Yanukovych dalam Hubungan Luar Negeri Ukraina dengan Uni Eropa Fahri Ananta Said dan Partogi J. Samosir	139-166
Pengaruh Karakteristik Sumber Daya Air di Palestina-Israel terhadap Pemberontakan Penduduk Palestina Pradono Budi Saputro	167-206
Pedoman Penulisan	207-208

**UPAYA ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE
DALAM MENANGANI KONFLIK DI UKRAINA TIMUR**

Muhammad Dedy Yanuar dan Ali Muhammad
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55184
dedyyanuar99@gmail.com
alimuhammad@umy.ac.id

Abstrak

Artikel ini akan menepohng peran *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) dalam menanganl krisis di Ukraina Timur pada tahun 2014. Setelah jatuhnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang pro-Rusia tahun 2014, Rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah Krimea secara ilegal. Aneksasi ilegal terhadap Krimea itu kemudian diikuti dengan pecahnya konflik bersenjata antara pihak separatist pro-Rusia dengan pihak pemerintah di wilayah Ukraina Timur. Konflik berlarut-larut karena Rusia melakukan intervensi dengan mendukung pihak pemberontak. Bagaimana upaya OSCE dalam menanganl krisis tersebut? Artikel ini menunjukkan bahwa OSCE berperan strategis dalam merespon krisis tersebut. *Pertama*, OSCE berusaha untuk menjembatani dan meredakan ketegangan dengan melibatkan kedua negara yang sedang berkonflik melalui wadah dialog yang bersifat komprehensif. *Kedua*, OSCE mengirimkan Misi Pemantauan Khusus untuk memonitor dinamika krisis di Ukraina Timur secara intensif. *Ketiga*, OSCE melaksanakan Misi Penilaian Hak Asasi Minoritas guna melindungi kaum minoritas nasional di Ukraina. *Keempat*, OSCE juga menciptakan *Interparliamentary Liaison Assembly* melalui organ *Parliamentary Assembly* untuk mempromosikan dialog terbuka dan komprehensif antarnegara agar dapat terjadi de-eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Kata kunci: OSCE, *cooperative security*, krisis, Krimea, Ukraina Timur, Rusia

Abstract

This article examines the role of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in handling the crisis in Eastern Ukraine in 2014. After the fall of pro-Russian Ukrainian President Viktor Yanukovych in 2014, Russia illegally annexed Crimea. The annexation was followed by the outbreak of armed conflict between pro-Russian separatist parties and the Ukrainian government in the Eastern Ukraine region. The conflict became protracted as Russia intervened in favor of the rebels. How was the OSCE's effort in handling the crisis? This article shows that the OSCE has played a strategic role in responding to the crisis. First, the OSCE sought to bridge and alleviate tensions by engaging both conflicting parties through a comprehensive dialogue framework. Secondly, the OSCE sent a Special Monitoring Mission to intensively monitor the dynamics of the crisis in Eastern Ukraine. Thirdly, the OSCE implemented the Minority Rights Assessment Mission to protect national minorities in Ukraine. Fourthly, the OSCE also created the Interparliamentary Liaison Assembly to promote an open and

meredakan ketegangan dengan melibatkan kedua negara yang sedang berkonflik melalui wadah dialog yang bersifat komprehensif. Kedua, OSCE mengirimkan Misi Pemantauan Khusus untuk memonitor dinamika krisis di Ukraina Timur secara intensif. Ketiga, OSCE melaksanakan Misi Penilaian Hak Asasi Minoritas guna melindungi kaum Minoritas Nasional di Ukraina. Keempat, OSCE juga menciptakan *Inter-parliamentary Liaison Assembly* melalui organ *Parliamentary Assembly* untuk mempromosikan dialog terbuka dan komprehensif antarnegara agar dapat terjadi de-eskalasi konflik di wilayah tersebut. Namun demikian, dalam upaya meredakan ketegangan tersebut, OSCE masih menemui berbagai hambatan di lapangan akibat ketegangan hubungan bilateral antara Ukraina dan Rusia.

Instabilitas Politik di Ukraina

Konflik bersenjata yang terjadi di Ukraina Timur berawal dari gelombang demonstrasi rakyat melawan Presiden Yanukovych yang pro-Rusia sejak awal tahun 2014. Pemicu gelombang protes rakyat tersebut adalah keputusan Presiden Yanukovich untuk tidak menandatangani kerja sama ekonomi yang ditawarkan oleh Uni Eropa. Presiden Yanukovich justru menandatangani kesepakatan kerja sama

ekonomi dengan Rusia yang berisikan komitmen Rusia untuk segera melakukan investasi sebanyak puluhan miliar dollar AS di Ukraina. Akhirnya, keputusan yang diambil oleh Presiden Yanukovych untuk melakukan kesepakatan kerja sama ekonomi dengan Rusia tersebut memicu aksi protes rakyat besar-besaran terhadap Pemerintah Ukraina. Demonstrasi besar-besaran ini akhirnya mengakibatkan tumbangny pemerintah Yanukovich (Aljazeera, 2014).

Setelah pemerintahan Ukraina yang dipimpin oleh Yanukovych terguling, Petro Poroshenko yang pro-Barat dilantik sebagai presiden yang baru. Pada rezim baru ini, Ukraina memilih untuk bersikap pro-Barat dan Uni Eropa serta menunjukkan sikap represif dengan melarang penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi di Ukraina Timur. Hal tersebut mendapat kecaman dari Rusia dan masyarakat yang tidak menyetujui sikap tersebut, khususnya dalam hal kerja sama dengan Uni Eropa dan negara-negara Barat. Pihak-pihak yang tidak menyetujui adalah masyarakat pro-Rusia yang bertempat tinggal di wilayah Krimea, Ukraina Timur atau Selatan. Pihak masyarakat yang bersikap pro-Rusia di Krimea tersebut melakukan demonstrasi sebagai wujud atas rasa kekecewaan terhadap Presiden Poroshenko yang

Rusia menilai bahwa sikap pemerintah baru Ukraina merugikan kepentingan Rusia. Presiden Vladimir Putin menganggap bahwa pemerintahan Ukraina saat ini berada di bawah pengaruh para kaum “nasionalis radikal” yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat Rusia yang berdomisili di Ukraina Timur. Kekhawatiran Putin lainnya adalah kuatnya pengaruh negara-negara Barat serta hilangnya jaminan keselamatan penduduk yang pro-Rusia di Ukraina pasca tumbangannya pemerintahan Presiden Yanukovich. Melihat hal tersebut, akhirnya Putin mengirimkan pasukan militer Rusia ke sejumlah daerah di wilayah Ukraina Selatan dan wilayah Ukraina Timur dengan tujuan untuk melindungi masyarakat Ukraina yang berkebangsaan dan berbahasa Rusia.

Itulah sebabnya Presiden Putin memberikan dukungan sepenuhnya atas upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok pemberontak separatis pro-Rusia. Presiden Putin juga disinyalir berambisi untuk mengembalikan Rusia ke masa kejayaan Uni Soviet. Aksi dari sokongan bantuan pasukan militer yang diberikan kepada gerakan separatis pro-Rusia tersebut merupakan bagian dari upaya Rusia untuk mengamankan warga

berkebangsaan Rusia di Ukraina tersebut (BBC Indonesia, 2015).

Namun pada kenyataannya, pemberian bantuan militer tersebut digunakan oleh Rusia sebagai alat untuk mengekspansi wilayah-wilayah Ukraina. Hal tersebut terlihat dengan jatuhnya wilayah Krimea, Donetsk, dan Luhansk ke tangan masyarakat yang pro-Rusia. Selain menggunakan jalur militer untuk melakukan ekspansi wilayah ke Ukraina, Rusia juga menggunakan instrumen ekonomi, yakni ekspor gas alamnya yang melimpah untuk mengancam negara-negara di wilayah Eropa, khususnya Eropa Timur, agar stabilitas perekonomiannya terganggu (Pujayanti, 2014).

Cooperative Security dan Peran OSCE

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) adalah organisasi keamanan terbesar di dunia. Mandat organisasi ini termasuk isu kontrol persenjataan, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers, dan pemilihan umum yang adil. OSCE awalnya didirikan saat Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur pada tahun 1975 dengan nama *Conference on Security and Co-operation in Europe* (CSCE). OSCE menaruh perhatian kepada peringatan dini dan pencegahan konflik, manajemen krisis, dan

stabilitas keamanan regional Eropa, OSCE memiliki tanggung jawab terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di Ukraina Timur karena Ukraina adalah anggota OSCE. Rasa tanggung jawab dan kepedulian OSCE ditunjukkan dengan cara berperan aktif dalam usaha menciptakan manajemen krisis dan pencegahan konflik di Ukraina Timur. Meskipun dinamika konflik yang terjadi di wilayah Donetsk dan Luhansk di bagian timur Ukraina ini terus meningkat, Pemerintah Ukraina dan gerakan separatis pro-Rusia sepakat melaksanakan gencatan senjata yang disponsori oleh OSCE pada tanggal 1 September 2015. Gencatan senjata ini berfungsi untuk menurunkan jumlah korban yang tewas akibat konflik tersebut (VOA Indonesia, 2015). Upaya penting OSCE adalah melakukan upaya dialog keamanan dan melakukan kegiatan strategis, yakni mengirimkan misi pemantauan khusus, melakukan kegiatan verifikasi militer, mengirimkan misi penilaian hak asasi minoritas, membentuk proyek dialog nasional, dan menjadi koordinator proyek.

1. Misi Pemantauan Khusus

Pada tanggal 21 Maret 2014, semua negara anggota OSCE, termasuk Ukraina dan Rusia, berdialog dan mengambil sebuah keputusan secara

konsensus untuk melaksanakan Misi Pemantauan Khusus ke Ukraina. Kantor Pusat Misi Pemantauan Khusus OSCE ini berlokasi di Kiev. Para pemantau kemudian dikirim ke kota-kota besar di Ukraina, seperti Kherson, Odessa, Lviv, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk, Chernivtsi, dan Luhansk (OSCE Special Monitoring Mission, 2015).

Misi tersebut beroperasi di bawah prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Misi Pemantauan Khusus bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan laporan mengenai pengamanan situasi di lapangan, merumuskan fakta-fakta yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di lapangan, dan yang paling utama adalah membantu Ukraina untuk meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik untuk mendorong perdamaian, stabilitas dan keamanan. Kemudian, Misi Pemantauan Khusus ke Ukraina ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu Misi Pengamatan OSCE di Pos-pos Pemeriksaan Rusia di Wilayah Gukovo dan Donetsk (*OSCE Observer Mission at the Russian Checkpoints Gukovo and Donetsk*) dan Misi Verifikasi Militer (OSCE Special Monitoring Mission, 2015).

Misi Pengamatan OSCE di Pos-pos Pemeriksaan Rusia di Wilayah

Hongaria, Latvia, Lituania, Luxemburg, Moldova, Montenegro, Belanda, Polandia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Amerika Serikat, dan Inggris. Mereka telah mengadakan 25 kegiatan verifikasi di Ukraina. Sejumlah negara yang meliputi Belgia, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Latvia, Belanda, Norwegia, Polandia, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, dan Amerika Serikat telah mengadakan 11 kegiatan verifikasi militer di wilayah Federasi Rusia. Kemudian, kunjungan-kunjungan yang dilakukan di Ukraina Timur ini berupa inspeksi militer dan kegiatan verifikasi militer, sesuai dengan isi Dokumen Wina tahun 2011 yang merupakan suatu bentuk respon dan perhatian yang lebih besar dari OSCE dalam menangani krisis berkepanjangan yang terjadi di Ukraina Timur tersebut.

3. Misi Penilaian Hak Asasi Minoritas

Sejak terjadinya aneksasi terhadap wilayah Krimea yang diikuti dengan jatuhnya wilayah Donetsk dan Luhansk ke tangan gerakan separatis pro-Rusia, banyak terjadi pelanggaran hak-hak asasi minoritas, khususnya di wilayah Ukraina Timur (Sasongko, 2014). Isu ini kemudian bukan hanya direspon oleh OSCE, melainkan juga oleh PBB. Sekretaris Jenderal PBB, Ban

Ki-moon, menegaskan bahwa kaum minoritas yang ada di Ukraina harus dihormati dan dilindungi (Adiladjali, 2014). Maka, untuk menanggapi hal tersebut, Ukraina meminta bantuan OSCE sebagai organisasi keamanan internasional untuk membantu melindungi hak-hak asasi manusia kaum minoritas yang ada di Ukraina, khususnya etnis Tatar Krimea yang pernah dideportasi dari Ukraina beberapa tahun yang lalu (OSCE, 2015).

Dalam rangka menanggapi permintaan dari Pemerintah Ukraina kepada OSCE pada tanggal 3 Maret 2014 mengenai Misi Penilaian Hak Asasi Manusia ke Ukraina, khususnya terkait situasi pelanggaran hak-hak asasi manusia kaum minoritas di sana, OSCE melibatkan lembaganya yang terkait akan penyelesaian masalah tersebut, yaitu Komisi Tinggi Urusan Minoritas Nasional (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2014).

Komisi Tinggi Urusan Minoritas Nasional OSCE (HCNM) merupakan sebuah institusi di OSCE yang bekerja untuk mengidentifikasi dan mencari penyelesaian pertama dari ketegangan etnis yang mungkin dapat membahayakan perdamaian, stabilitas, atau hubungan persahabatan antar negara-negara anggota OSCE itu sendiri. Komisaris Tinggi sendiri sebenarnya

khusus di Ukraina yang memfokuskan pada pemeliharaan hak-hak asasi manusia kaum minoritas dari semua etnis yang ada di seluruh wilayah Ukraina (OSCE High Commissioner on National Minorities, 2015).

4. Proyek Dialog Nasional

Atas permintaan Ukraina pada tanggal 20 Maret 2014, OSCE juga mengerahkan sebuah tim yang terdiri dari 15 pakar internasional sebagai bagian dari sebuah Proyek Dialog Nasional untuk mengidentifikasi lebih lanjut wilayah-wilayah kegiatan OSCE untuk mendukung dalam membangun kepercayaan di antara perbedaan lapisan masyarakat di Ukraina. Tim proyek tersebut dikerahkan selama empat minggu di Odessa, Kharkiv, Luhansk, Dnepropetrovsk, Donetsk, dan Lviv. Proyek tersebut dilaksanakan oleh Koordinator Proyek OSCE dan dipimpin oleh Duta Besar Hidajet Bišćević yang berasal dari Kroasia.

Proyek tersebut membantu membuka jalan bagi sebuah inisiatif baru yang bersifat komprehensif, yaitu "Dialog Nasional untuk Reformasi, Keadilan, dan Pembangunan" yang diluncurkan pada musim semi 2015. Hal ini akan memberikan perluasan wawasan di lapangan melalui acara debat tingkat lokal dan tingkat nasional mengenai

substansi reformasi, meningkatkan pengembangan komunitas pakar mediator dan fasilitator dialog Ukraina, berusaha untuk menjamin aksesibilitas dan transparansi dari keadilan konstitusional, dan meningkatkan partisipasi warga sipil dalam mekanisme pencegahan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Proyek Dialog Nasional OSCE ini dilaksanakan oleh Koordinator Proyek OSCE di Ukraina dan dibantu oleh Majelis Parlemen OSCE yang bertujuan untuk memelihara dialog nasional tersebut di tingkat parlemen Ukraina.

5. Koordinator Proyek

Koordinator Proyek OSCE di Ukraina merupakan badan operasi lapangan yang bertugas untuk manajemen krisis dan pencegahan konflik. Pekerjaan-pekerjaan Koordinator Proyek OSCE meliputi tiga bidang utama. *Pertama*, demokratisasi dan pemerintahan yang bersih. *Kedua*, aturan hukum dan hak asasi manusia. *Ketiga*, program lintas dimensi yang terdiri dari ekonomi, lingkungan, dan politik-militer.

Koordinator Proyek OSCE di Ukraina ini diberi mandat untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek-proyek dalam rangka membantu Ukraina meningkatkan keamanan negaranya dan membantu

Kesimpulan

Artikel ini menganalisis peran penting *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) dalam menangani krisis di Ukraina Timur 2014. Setelah jatuhnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovich yang pro-Rusia tahun 2014, Rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah Krimea secara ilegal. Aneksasi ilegal terhadap Krimea itu kemudian diikuti dengan pecahnya konflik bersenjata antara pihak separatistis pro-Rusia dengan pihak pemerintah di wilayah Ukraina Timur. Konflik berlarut-larut karena Rusia melakukan intervensi dengan mendukung pihak pemberontak.

Artikel ini menunjukkan bahwa OSCE berperan strategis dalam merespon krisis tersebut. *Pertama*, OSCE berusaha untuk menjembatani dan meredakan ketegangan dengan melibatkan kedua negara yang sedang berkonflik melalui wadah dialog yang bersifat komprehensif. *Kedua*, OSCE mengirimkan Misi Pemantauan Khusus untuk memonitor dinamika krisis di Ukraina Timur secara intensif. *Ketiga*, OSCE melaksanakan Misi Penilaian Hak Asasi Minoritas guna melindungi kaum minoritas nasional di Ukraina. *Keempat*, OSCE juga menciptakan *Interparliamentary Liaison Assembly* melalui organ *Parliamentary Assembly*

untuk mempromosikan dialog terbuka dan komprehensif antar-negara agar dapat terjadi de-eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Namun demikian, dalam upaya meredakan konflik di Ukraina tersebut, OSCE masih menemui berbagai hambatan di lapangan akibat ketegangan hubungan bilateral antara Ukraina dan Rusia.

Daftar Pustaka

Buku

- Bache, Ian dan Stephen George. *Politics in the European Union*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons. *Handbook Hubungan Internasional*. Jakarta: Nusa Media, 2014.
- Cohen, Richard dan Michael Mihalka. *Cooperative Security: New Horizons for International Order*. Garmisch-Partenkirchen: George C. Marshall European Center for Security Studies, 2001.
- Galbreath, David J. *The Organization for Security and Co-operation in Europe*. New York: Routledge, 2007.

Crisis in Ukraine". *Thematic Reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine*. OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (11 Februari 2015).

Wahyu. *Politik Luar Negeri Rusia terhadap Ukraina dalam Kasus Crimea*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2015).

Internet

Adiladjali. "Di Rusia, Ban serukan dialog yang jujur dan konstruktif antara Kiev dan Moskow". *United Nations Information Centre Jakarta*, 21 Maret 2014. <http://unic-jakarta.org/2014/03/21/di-rusia-ban-serukan-dialog-yang-jujur-%E2%80%8B%E2%80%8Bdan-konstruktif-antara-kiev-dan-moskow/> (diakses pada tanggal 28 November 2015).

Aljazeera. Timeline: "Ukraine's political crisis". *Aljazeera*, 20 September 2014. <http://www.aljazeera.com/news/europe/2014/03/timeline-ukraine-political-crisis-201431143722854652.html> (diakses pada tanggal 28 November 2015).

BBC Indonesia. "Krisis Ukraina: 'Pasukan khusus Rusia' ditangkap". *BBC Indonesia*, 18 Mei 2015. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150518_dunia_russia_soldiers (diakses pada tanggal 10 Oktober 2015).

BBC Indonesia. "Pertempuran Militer Ukraina dan Pemberontak Marak". *BBC Indonesia*, 20 Januari 2015. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/01/150120_ukraina_tempur_donetsk (diakses pada tanggal 28 November 2015).

BBC Indonesia. "Peta perdamaian Ukraina disepakati". *BBC Indonesia*, 12 Februari 2015. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/02/150212_ukraina_sepakat (diakses pada tanggal 10 Oktober 2015).

Berlianto. "Ukraina Wacanakan Penghapusan Hak Veto Rusia di PBB". *Sindonews.com*, September 2015. <http://international.sindonews.com/read/1046021/41/ukraina-wacanakan-penghapusan-hak-veto-rusia-di-pbb-1442499679> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2015)..

- (diakses pada tanggal 19 November 2015).
- OSCE High Commissioner on National Minorities. "OSCE High Commissioner on National Minorities Assess Inter-Ethnic Situation In South-Eastern Ukraine". *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/hcnm/198856> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- OSCE High Commissioner on National Minorities. "OSCE High Commissioner on National Minorities urges dialogue and compromise on 'divisive' language law in Ukraine". *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/hcnm/92418> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- OSCE Observer Mission at the Russian Checkpoints Gukovo and Donetsk. "The OSCE Observer Mission at the Russian Checkpoints Gukovo and Donetsk, Who We Are". *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/om/121739> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- OSCE Parliamentary Assembly. "Ukraine: Responding to the Crisis". *OSCE Parliamentary Assembly*, 20 Mei 2015. <http://www.oscepa.org/parliamentary-diplomacy/ukraine-responding-to-the-crisis> (diakses pada tanggal 19 November 2015).
- OSCE Special Monitoring Mission. "Special Monitoring Mission, What We Do". *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/ukraine-smm/117799> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- OSCE Special Monitoring Mission. "Special Monitoring Mission, Who We Are". *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/ukraine-smm/117795> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- OSCE. "Factsheet on OSCE Engagement with Ukraine, OSCE Response to the crisis in and around Ukraine". *OSCE*, 1 Juni 2015. <http://www.osce.org/home/125575> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- OSCE. "Mandate of OSCE Project Coordinator in Ukraine". *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/ukraine/106005> (diakses pada tanggal 19 November 2015).